

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI PRODUKTIF
(Studi Kasus Program Pnpm Di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)**

Soleh Suharsono, Bashori Muchsin, Afifudin

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

LPPM Unisma Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

E-mail: solehsuhar@gmail.com

ABSTRAK

Program pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia secara umum bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan program bantuan kepada rakyat miskin di perkotaan sehubungan dengan terjadinya krisis ekonomi, tetapi ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan yang terjadi, namun juga bersifat strategis karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan masyarakat di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan PNPM dalam upaya meningkatkan ekonomi produktif masyarakat di Kelurahan Tlogomas Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pada penelitian metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif (Interactive model) dari Milles and Hubberman dan Saldana (2014) Kebijakan PNPM yang diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan Tlogomas yang dijalankan oleh BKM Tlogomas merupakan usaha untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan khususnya di lingkungan kelurahan Tlogomas kota Malang. Proyek PNPM telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, terutama yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 343/KPTS/1999 tentang Manual Project Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Sampai tahun 2018 terdapat 47 KSM di kelurahan Tlogomas yang memperoleh bantuan modal dari program PNPM, besarnya bantuan modal yang dicairkan untuk masing-masing KSM berbeda satu dengan lainnya yaitu antara Rp 2 juta sampai Rp 18 juta dan dengan jangka waktu yang bervariasi yaitu antara 1 tahun sampai 5 tahun. Bantuan modal tersebut di ajukan untuk menambah modal usaha untuk menunjang dan mengembangkan usaha yang dilaksanakan oleh masing-masing KSM yang bergerak diberbagai jenis usaha kecil. Program tersebut dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan usaha produktif KSM. Sebagian besar KSM yang menerima bantuan modal mampu meningkatkan penghasilannya, mampu meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Upaya Meningkatkan Ekonomi Produktif.

A. Latar Belakang Masalah

Program pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia secara umum bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan Ndraha bahwa : “ tujuan pembangunan adalah untuk menciptakan kondisi bagi percepatan perbaikan taraf hidup anggota masyarakat”.¹ Pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Persoalan kemiskinan ini merupakan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh semua negara, terutama negara-negara berkembang. Kemiskinan dinegara

berkembang umumnya disebabkan oleh keterbelakang, minimnya pengembangan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki serta ketidak tetapan strategi dan program pembangunan yang diterapkan. Strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan (*growth strategy*) terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara global, walaupun disisi lain ternyata justru memperlebar adanya ketimpangan dan kemiskinan dikalangan masyarakat.

Sebagai suatu proses yang terus berlangsung, pembangunan memiliki konsep yang senantiasa berkembang sesuai dengan kebutuhan negara dan masyarakat. Terdapat lima paradigma pembangunan yang

¹ Ndraha, Taliziduhu. 1992. *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*. Bina Aksara. Jakarta., hlm 20.

berkembang, yaitu : “*economik growth, welfare, neo economy, structuralize dan humanizing*”, dari kelima paradigma tersebut yang banyak diterapkan hanya tiga, yakni paradigma pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan pembangunan yang berpusat pada manusia (*humanizing/people centered*). Paradigma pembangunan yang terakhir ini populer dinegara-negara berkembang yang mengalami kegagalan menggunakan paradigma sebelumnya².

Mekanisme “*trickle down effect*” dari adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi terbukti tidak bisa berjalan dengan semestinya, karena kenyataannya keberadaan pembangunan dan industrialisasi tersebut justru menggeser dan menempatkan masyarakat kelas bawah pada posisi marginal. Akibatnya, pembangunan yang diharapkan akan dapat memakmurkan dan mensejahterakan, malah identik dengan pengusuran dan pengeliminasian terhadap sebagian anggota masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pembangunan tersebut.

Program penanggulangan kemiskinan telah dimulai sejak Pelita pertama namun pada kenyataan di lapangan, program-program tersebut banyak mengalami kendala. Ini berkaitan dengan sulitnya menghapus garis kemiskinan penduduk sehingga masih banyak jumlah masyarakat yang tergolong miskin. Salah satu prasyarat keberhasilan program pembangunan sangat tergantung pada ketepatan pengidentifikasian *target group* dan *target area*.³

Beberapa strategi yang pernah diterapkan pada program penanggulangan kemiskinan terdahulu seperti ; Kampung Improvement Programe (KIP), Village Improvement Project (VIP), Peremajaan Kampung Kumuh dengan pendekatan *community-based development* dan Pembangunan Perumahan Bertumpu pada kelompok (P2BPK). Termasuk pula pengalaman dalam penyelenggaraan program IDT, PPK dan program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) dan lainnya adalah berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Program pemberdayaan yang sekarang diselenggarakan oleh pemerintah adalah program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang merupakan

keberlanjutan dari program P2KP. Program ini dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut⁴:

1. Penyelenggaraan konsep Tribina (bina sosial, bina ekonomi dan bina lingkungan).
2. Pemberian dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan serta pinjaman bergulir untuk modal kerja kegiatan produktif.
3. Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk dapat membuka peluang usaha baru.
4. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat agar inisiatif mereka dapat ditumbuhkan dan diwujudkan.
5. Pendampingan pada Kelompok Swadaya Masyarakat atau KSM.

Program ini adalah kegiatan yang memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui berbagai usaha yang bersifat produktif. Dalam program tersebut pemerintah memberikan bantuan kredit kepada usaha kecil tanpa agunan untuk menunjang keberlanjutan dan pengembangan usahanya. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam program PNPM diharapkan tidak sebatas sebagai obyek yang menentukan keberadaan dan keberhasilan program ini bagi masyarakat. Selain berperan sebagai penerima dana bantuan dan pelaksana program, masyarakat juga berfungsi sebagai lembaga yang merencanakan sekaligus memantau dan mengendalikan jalannya proyek.

Program PNPM merupakan program bantuan kepada rakyat miskin di perkotaan sehubungan dengan terjadinya krisis ekonomi, tetapi ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan yang terjadi, namun juga bersifat strategis karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan masyarakat di masa yang akan datang. Program PNPM yang dilaksanakan di perkotaan ini menganut pendekatan pemberdayaan (*empowerment*) sebagai suatu syarat menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), dengan sistematika sebagai berikut :

Program PNPM bertujuan untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui hal-hal berikut.

1. Penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru.

² Ibid., hlm 24

³ Saragih. B. 2000. *Pendapatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pemikiran Ekonomi Rakyat dan Otonomi Daerah. Penerbit, Media Sarana Press, Jakarta., hlm 16

⁴ Sumodinigrat. 2005. *Efektifitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat*. Dalam www.Litbang.go.id.atricket167.html., hlm 3. diakses 15 Mei 2010.

2. Penyediaan dan hibah untuk pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang butir 1 diatas.
3. Peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha-usaha baru yang bersifat produktif dan berbasis pada usaha kelompok.
4. Penyiapan, pengembangan, dan pemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan untuk dapat mengkoordinasi dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan.
5. Pencegahan penurunan kualitas lingkungan melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan.

Program PNPM dilaksanakan melalui strategi-strategi sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan konsep tribina (bina sosial, bina ekonomi, dan bina lingkungan).
2. Pemberian dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan serta pinjaman dana bergulir untuk modal kerja kegiatan produktif.
3. Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk dapat membuka peluang usaha baru.
4. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat agar inisiatif mereka dapat ditumbuhkan dan diwujudkan.
5. Pendampingan pada KSM⁵

Salah satu kebijakan dalam program PNPM adalah pemberian bantuan modal bagi usaha kecil produktif (kredit tanpa agunan) yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan usaha produktif. Pemberian bantuan kredit tanpa agunan bagi usaha kecil dalam program PNPM tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh setiap anggota masyarakat yang menerimanya dengan sebaik mungkin agar mampu meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam kaitan usaha pemerintah mengatasi kemiskinan.

Kemiskinan dinegara berkembang umumnya disebabkan oleh keterbelakang, minimnya pengembangan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki serta ketidak tetapan strategi dan program pembangunan yang diterapkan. Ismail dan Hoetoro dalam Sarman (2011) menyebutkan ketimpangan sosial dan

kemiskinan akibat pembangunan secara politik ekonomi dapat diterjemahkan sebagai hasil dari proses yang mendorong konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di satu pihak dan menumbuhkan massa pinggiran (periphery) yang memiliki daya tawar lemah di pihak lain. Sedangkan dari sudut pandang sosial ekonomi, bisa dianggap sebagai akibat dari sistem penyaringan (filter) yang ada dalam masyarakat, dimana struktur-struktur sosial telah berkembang begitu rupa sehingga menghambat sekelompok orang untuk ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.⁶

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan (growth strategy) terbukti mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi secara global, walaupun disisi lain ternyata justru memperlebar adanya ketimpangan dan kemiskinan dikalangan masyarakat. Mekanisme "trickle down effect" dari adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi terbukti tidak bisa berjalan dengan semestinya, karena kenyataannya keberadaan pembangunan dan industrialisasi tersebut justru menggeser dan menempatkan masyarakat kelas bawah pada posisi marjinal. Akibatnya, pembangunan yang diharapkan akan dapat memakmurkan dan mensejahterakan, malah identik dengan penggusuran dan pengeliminasian terhadap sebagian anggota masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pembangunan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan mengambil judul : Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogomas Kota Malang ?
2. Apakah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dapat memberikan manfaat dalam mengatasi kemiskinan masyarakat di Kelurahan Tlogomas Kota Malang ?

⁵ Soetrisno, 2009. *Implementasi Kebijakan Program Pengentasan Kemiskinan*. Bappenas-UNDP. Jakarta., hlm 4.

⁶ Sarman M. & Sayogyo .2011. *Masalah Penanggulangan Kemiskinan Refleksi dari Kawasan Timur Indonesia*. Puspa Swara, Jakarta. hlm 32.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogomas Kota Malang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam mengatasi kemiskinan masyarakat di Kelurahan Tlogomas Kota Malang

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis: Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Negara yang berhubungan dengan implementasi kebijakan, sehingga dapat dijadikan sebagai sumbangan kepustakaan dan analisis teoritik khususnya terhadap implementasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan, dan pengetahuan terhadap Ilmu Administrasi Negara yang berhubungan dengan implementasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Bagi Instansi Terkait
Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan memberikan sumbangan pemikiran berkaitan dengan meningkatkan hasil implementasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Bagi Masyarakat
Dapat dijadikan bahan informasi bagi masyarakat sebagai bahan dalam partisipasi terhadap implementasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

E. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif disebut juga penelitian taksinomik, yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.⁷

Strauss dan Corbin, (1990) menyebutkan metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu fenomena

pengembangan sumber daya aparatur yang belum diketahui. Metode ini dapat pula memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.⁸

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan Tlogomas Kota Malang, lokasi penelitian ini dipilih oleh peneliti dengan pertimbangan ;

1. Karena alasan praktis yaitu sebagai tempat tinggal peneliti sehingga memberikan keleluasaan untuk bergerak dari berbagai keterbatasan baik waktu, biaya, dan tenaga yang mendasari pertimbangan peneliti.
2. Karena peneliti sendiri sedikit banyak mengetahui kondisi dan perkembangan dalam kegiatan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilaksanakan sehubungan dengan program PNPM di kelurahan tersebut.
3. Peneliti menilai bahwa penyelenggaraan implementasi kebijakan yang dilaksanakan sehubungan dengan program PNPM di kelurahan tersebut tersebut masih perlu dikaji sehingga dapat memberikan hasil yang lebih besar dimasa mendatang.

G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting untuk menentukan batasan ruang lingkup penelitian, fokus penelitian membimbing dalam menajamkan pokok bahasan dan mendapatkan kedalaman penelitian serta dengan mempertimbangkan aspek keterbatasan. Melalui bimbingan dan arahan fokus penelitian yang ditetapkan, maka penelitian ini dapat mengetahui secara pasti data mana yang dapat dikumpulkan dan yang dihilangkan karena dianggap tidak relevan.⁹ Adapun fokus yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Implementasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogomas Kota Malang, terdiri dari :
 - 1.1. Organisasi Pengelola PNPM / BKM Tlogomas Kota Malang
 - 1.2. Realisasi Bantuan Modal PNPM Kepada KSM
2. Manfaat PNPM dalam mengatasi kemiskinan masyarakat di Kelurahan Tlogomas Kota Malang yaitu :
 - 2.1. Keadaan KSM Sebelum dan Setelah Mendapat Modal PNPM
 - 2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat

H. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, subyek penelitiannya adalah menyangkut tentang sumber-sumber

⁷ Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta. Jakarta, hal. 68.

⁸ Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi Baru. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta, hal 47

⁹ Ibid, hal 64

informasi yang berupa orang-orang yang biasa memberikan informasi dan tentang permasalahan yang menjadi pusat perhatian penelitian. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa data yang diharapkan lebih valid, apabila data dan informasi dari semua elemen terkait dengan penelitian. Karenanya, dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel, melainkan subyek penelitian.

Untuk mendapatkan data yang dapat menjawab rumusan masalah, maka subyek penelitian ini akan diambil perwakilan/sebagian dari mereka yang dianggap memahami tentang Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Sehingga hanya beberapa responden saja yang dipilih oleh peneliti, yaitu sebagai berikut.

Tabel
Subyek Penelitian / Responden

No	Nama (Inisial)	Jabatan	Keterangan
1	Ard. Mwy	Kepala Desa	1 orang
2	Ed, M	Sekretaris Desa	1 orang
3	M. Sh	Kaur Umum	1 orang
4	Wnt	Ketua BKM	1 orang
5	Ar. RH	Penguru BKM	1 orang
6	Anggota KSM	Anggota KSM	20 orang
Total			25 orang

I. Sumber Data

Adapun sumber data yang peneliti harapkan mampu untuk menambah atau memperkaya informasi mengenai fokus yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan individu atau arsip lain yang menjadi bagian dari obyek yang akan diteliti. Sumber data yang peneliti gunakan untuk mendukung tersedianya informasi bagi penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu :

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung diperoleh di lapangan, baik yang diamati oleh peneliti maupun pertanyaan yang diajukan peneliti kepada sumber data. Dalam penelitian ini data yang diperoleh merupakan hasil wawancara berdasarkan panduan melalui daftar pertanyaan yang dilakukan peneliti terhadap sumber data dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari beberapa masyarakat

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dipergunakan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dapat berupa sumber tertulis, naskah, peraturan perundang-undangan, foto-foto, dokumen pribadi ataupun dokumen resmi dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

J. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data atau mengumpulkan data sebaik-baiknya. Sehingga dengan begitu data yang diperoleh dapat diklarifikasikan dan diolah dan dianalisa dengan kerangka metode penelitian yang digunakan, sehingga memperoleh data yang akurat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara (interview). Arikunto (2006) menyebutkan ; “interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari wawancara (interview)”¹⁰

Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang secara fisik interview dapat dibedakan atas interview terstruktur dan interview tidak terstruktur.

K. Teknik Analisis Data

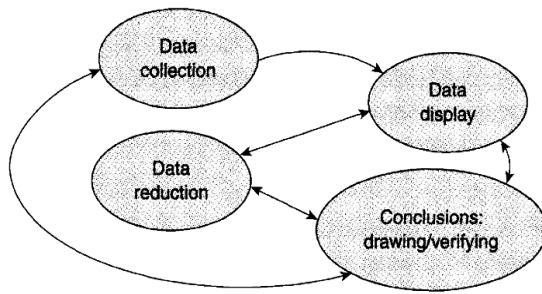
Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data sangat penting karena dengan melakukan analisis data, maka data dapat digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.¹¹

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data dalam bentuk kualitatif sehingga peneliti menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Pendapat Sanapiah Faisal mengenai analisa kualitatif adalah “ sebuah analisa data yang difokuskan pada penunjukan makna deskripsi, penjernihan dan penetapan data pada konteks masing-masing dan sering kali melukiskannya dalam kata-kata dari pada angka-angka. Data yang diperoleh disusun dalam pola tertentu, tema tertentu atau pokok permasalahan tertentu”.¹² Analisis data kualitatif dalam penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Miles & Huberman dan Saldana (2014) dengan model sebagai berikut.

¹⁰ Arikunto, Suharsimi. 2006. Op.Cit, hal. 76.

¹¹ Moleong, Lexy, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif* Jilid I. Posdakarya: Bandung, hal 87

¹² Faisal, Sanapiah. 1999. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada..



Gambar : Model Analisis Data Kualitatif
(Interactive model)

Sumber : Milles & Hubberman dan Saldana (2014) *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edisi Ketiga*. Sage Publications: Inc.

Dalam deskriptif kualitatif, dinyatakan bahwa analisis data tersebut terdiri dari tiga kegiatan, yaitu : (a) Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. (b) Penyajian Data (Data Display) Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. (c) Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-koritigulasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan "final" mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi data.

L. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah disajikan dan hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PNPM) yang diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan Tlogomas yang dijalankan oleh BKM Tlogomas merupakan usaha untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan khususnya di lingkungan kelurahan Tlogomas kota

Malang. Proyek PNPM telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, terutama yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 343/KPTS/1999 tentang Manual Project Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan.

2. Bantuan modal yang disalurkan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PNPM) yang diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan Tlogomas dan yang dijalankan oleh BKM Tlogomas untuk membantu permodalan usaha kecil yaitu kepada KSM dilakukan berdasarkan hasil penelitian/survey terhadap usaha KSM tersebut. Bantuan modal dalam program ini diperuntukan kepada KSM Tlogomas ditujukan untuk menunjang aktivitas usaha produktif, mengembangkan usaha dan meningkatkan kemampuan KSM dalam mencapai tujuan usaha produktif. Hingga tahun 2008 terdapat 47 KSM di kelurahan Tlogomas yang memperoleh bantuan modal dari program PNPM, besarnya bantuan modal yang dicairkan untuk masing-masing KSM berbeda satu dengan lainnya yaitu antara Rp 2 juta sampai Rp 18 juta dan dengan jangka waktu yang bervariasi yaitu antara 1 tahun sampai 5 tahun. Bantuan modal tersebut di ajukan untuk menambah modal usaha untuk menunjang dan mengembangkan usaha yang dilaksanakan oleh masing-masing KSM yang berberak diberbagai jenis usaha kecil.
3. Bantuan modal bagi usaha kecil dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PNPM) yang diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan Tlogomas yang dijalankan oleh BKM Tlogomas terhadap KSM Tlogomas secara umum dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan usaha produktif KSM tersebut. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian yang membuktikan bahwa sebagian besar KSM yang menerima bantuan modal mampu meningkatkan penghasilannya, mampu meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dan ekonomi. Namun tidak menutup kenyataan bahwa bantuan yang disalurkan dalam program PNPM tersebut masih belum memberikan dampak yang besar pada sebagian kecil KSM dalam membantu meningkatkan usahanya. Hal ini disebabkan jenis usaha yang dilakukan oleh KSM masih dalam taraf usaha kecil, adanya kesulitan KSM untuk memasarkan hasil usaha, dan kurangnya kemampuan sumber daya

manusia yang ada dalam KSM tersebut untuk mengembangkan usahanya.

M. Saran

Menindak lanjuti hasil penelitian tentang Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PNPM) di kelurahan Tlogomas kota Malang, disarankan :

1. Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PNPM) yang dijalankan oleh BKM Tlogomas untuk membantu usaha kecil yaitu KSM Tlogomas setidaknya harus dipertahankan dan ditingkatkan, karena Program PNPM tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya bagi KSM dalam memenuhi kebutuhan permodalan untuk mendukung usaha yang ditekuni. Bantuan modal yang bersumber dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PNPM) di kelurahan Tlogomas terbukti dapat dimanfaatkan oleh sebagian besar KSM untuk mendukung dan meningkatkan usaha produktifnya. Oleh karena itu program ini harus dikelola dengan cara yang lebih profesional, meningkatkan kerjasama dari masing-masing pihak yaitu aparat kelurahan, pengurus BKM dan KSM sebagai penerima bantuan modal agar program ini lebih berguna dan bermanfaat.
2. Implementasi kebijakan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PNPM) di kelurahan Tlogomas dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan perlu melibatkan seluruh unsur lapisan masyarakat. Untuk itu diperlukan usaha meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, BKM atau kedua belah pihak yaitu KSM sebagai penerima bantuan. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia khususnya untuk pengurus BKM Tlogomas agar mampu membina KSM dalam menjalankan aktivitas usahanya sehingga modal yang disalurkan mampu menunjang kemajuan usaha KSM yang merima bantuan.
3. Guna meningkatkan kemampuan usaha kecil yaitu KSM Tlogomas yang mendapatkan bantuan modal dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PNPM) yang dijalankan oleh BKM Tlogomas dalam hal ini dapat ditarik benang merah bahwa :
 - a) Implementasi kebijakan program PNPM perlu dilakukan evaluasi secara periodik agar dapat disusun sesuai dengan struktur sosial ekonomi masyarakat kelurahan Tlogomas.
 - b) Dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan program PNPM diperlukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang lebih baik dari masing-masing pihak agar dapat mengetahui dan memahami

kondisi yang sesungguhnya didalam anggota masyarakat sehingga program PNPM mencapai sasaran dan tujuan.

- c) Bantuan modal yang disalurkan kepada KSM harus dilaksanakan dengan lebih selektif agar modal tersebut benar-benar dipergunakan oleh KSM untuk usaha produktif dan mampu menunjang serta meningkatkan usaha produktif KSM yang telah diselenggarakan.
 - d) Keberhasilan program Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PNPM) di kelurahan Tlogomas untuk membantu masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan tidak terlepas dari kemampuan manajemen dan sumber daya manusia oleh karena itu diperlukan kebijakan yang tepat sasaran dalam program PNPM yang menekankan pada pengembangan kemampuan sumber daya bagi pengurus BKM dan KSM kelurahan Tlogomas.
 - e) Modal yang telah disalurkan kepada KSM yang masih macet harus segera diatasi yaitu dengan meminta kesadaran pengurus KSM untuk segera melunasi pinjaman, dengan adanya kemacetan penyetoran angsuran pinjaman dari KSM dalam program PNPM ini sudah barang tentu akan mengganggu kerja BKM dalam mengelola dan meneruskan program tersebut, selain itu akan berdampak pula terhadap KSM yang tertib untuk ikut-ikutan melakukan perbuatan serupa dan hal ini yang perlu diantisipasi dengan bijaksana.
 - f). Bantuan modal dari program PNPM sebaik tidak hanya difokuskan pada KSM akan tetapi bisa diberikan kepada individu yang memiliki usaha produktif dan benar-benar membutuhkan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya.
4. Mengingat program PNPM yang diselenggarakan dan laksanakan oleh BKM belum mempunyai badan hukum yang kuat dan aman, maka diperlukan penguatan badan hukum dari program PNPM sebagai sebuah program yang mempunyai profit jangka panjang. Penguatan badan hukum tersebut dapat berupa lembaga keuangan kelurahan (*bisa berbentuk koperasi atau lembaga keuangan mikro*). Dengan adanya badan hukum ini maka program tersebut akan lebih aman dimana setiap pihak yang terlibat akan mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas, ada sanksi atas pelanggaran hak dan kewajiban bahkan terdapat prestasi atau penghargaan atas prestasi dari masing-masing pihak yang mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, dan solusi mampu memberikan pencapaian tujuan jangka panjang program PNPM dalam upaya meningkatkan

pemberdayaan masyarakat guna menekan dan mengentaskan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius, Tarigar. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Penerbit, PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.
- Arief, D. Sulistya. 2014. Profesionalisme Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan Publik. Universitas Diponogoro, Press. Semarang.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. PT. Rineka Cipta. Jakarta,
- Aris Ananta, 2015. Ciri Demografis, Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi, Lembaga Demografi dan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Endah, Suhesti. 2014. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Program PNPM) di Kecamatan Kepanjen. Ringkasan Skripsi, FIA Universitas Merdeka Malang.
- Faisal, Sanapiah. 1999. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada
- Islamy, M. Irfan. 2007. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Bina Aksara. Jakarta.
- Milles & Hubberman dan Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edisi Ketiga. Sage Publications: Inc.
- Miftahul, Mila. 2016. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan. (Studi Terhadap Peranan LKM pada PNPM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). Ringkasan Skripsi, FIA Universitas Merdeka Malang.
- Moleong, Lexy, 2002. Metode Penelitian Kualitatif Jilid I. Posdakarya: Bandung,
- Ndraha, Taliziduhu. 1992. Metodologi Penelitian Pembangunan Desa. Bina Aksara. Jakarta.
- Nugroho, D, Riant. 2009. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurudin, Moch. 2014. Berbagai Persoalan Dalam Implementasi Kebijakan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi. Edisi IV, Bulan Juli tahun 2014. Diakses tanggal 10 desember melalui www.jurnal_administrasi.go.id
- Prakoso, Djoko. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Dalam Teori dan Praktek. Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Prijono, O.S. dan Pranarka A. 2012. Pemberdayaan : Konsep. Kebijakan dan Implementasi. CSIS, Jakarta.
- Saragih. B. 2000. Pendapatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. Pemikiran Ekonomi Rakyat dan Otonomi Daerah. Penerbit, Media Sarana Press, Jakarta.
- Sarman M. & Sayogyo .2011. Masalah Penanggulangan Kemiskinan Refleksi dari Kawasan Timur Indonesia. Puspa Swara, Jakarta.
- Soetrisno, 2009. Implementasi Kebijakan Program Pengentasan Kemiskinan. Bappenas-UNDP. Jakarta.
- Sumodinigrat. 2005. Efektifitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. Dalam www.litbang.go.id/atiriket167.html, hlm 3. diakses 15 Mei 2010.
- Suryana. 2013. Implementasi Kebijakan Publik. Bagian Penerbit, Universitas Diponogoro Press, Semarang.
- Syamsul, Setyono. 2017. Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan (Studi Terhadap Efektifitas Pemberian Bantuan Modal Produktif Program PNPM Masyarakat Miskin Kelurahan Sukun Kota Malang.
- Umar, Husein. 2005. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Edisi Baru. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta,
- Wahab, Solichin Abdul. 2007. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wardhono, S. 2012. Evaluasi Pengelolaan Proyek pada Program Pemberdayaan Daerah dalam mengatasi Krisis Ekonomi (PPD-DKE) di Sidoarjo. Ringkasan Skripsi, FIA Universitas Brawijaya Malang.
- Wasis dan Fauzi. 2010. Model-Model Implementasi Kebijakan. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang. Press. Malang.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo. Yogyakarta
- Wulandari, B. 2013. Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Program PPD-DKE di Kecamatan Turen Kab. Malang. Ringkasan Skripsi, FIA Universitas Brawijaya Malang.

